

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data

4.1.1. Gambaran Umum

UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara merupakan salah satu sekolah jenjang SMP berstatus Negeri yang berada di wilayah Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara. UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara didirikan pada tanggal 01 Januari 1970 dengan Nomor SK Pendirian yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekolah ini memberikan pendidikan berkualitas dengan terakreditasi C dan sertifikasi ISO 9001:2000. Dengan adanya keberadaan UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa di wilayah Kec. Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat.

Alamat UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara terletak di Lahagu, Kecamatan Mandrehe Utara, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara.

a. Profil Sekolah

- Nama Sekolah : UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara
- NPSN : 10258379
- Status Sekolah : Negeri
- Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
- Alamat Sekolah : Desa Lahagu, Kecamatan Mandrehe
Utara, Kabupaten Nias Barat, Provinsi
Sumatera Utara
- Tanggal SK Pendirian : 2007-07-17
- SK pendirian sekolah : -
- SK Izin Operasional : -
- Tanggal SK Izin
Operasional : 1910-01-01

b. Visi dan Misi Sekolah

1) Visi

Mewujudkan komunitas yang memiliki Profil Pelajar Pancasila

2) Misi

- Mengoptimalkan kegiatan keagamaan dan mengintegrasikan Iman dan Taqwa dalam proses pembelajaran
- Mengintegrasikan penanaman karakter profil pelajar pancasila dan proses pembelajaran
- Menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian peserta didik
- Melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang
- Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan mitra terkait
- Menyalurkan bakat dan minat peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler
- Menjaga lingkungan sekolah agar tetap rapi, bersih, kondusif dan ramah anak.

4.1.2. Sumber Daya Manusia di Sekolah Guru, Siswa, dan Tenaga Pendidik

a. Keadaan Guru dan Pegawai

Tabel 2 : Keadaan Guru dan Pegawai UPTD SMP Negeri 1 Mendrehe Utara

No	Nama	NIP	JK	Jabatan
1	Murni Lahagu, S.Th	197904162011011001	L	Kepala Sekolah
2	Agustinus A. P. Gulo, S.Pd	199108082019031009	L	Wakasek
3	Mesrawati Ndruru, S.Pd	197903242012092001	P	Kepala Lab.
4	Agus damai Lahagu, S.Pd	199008262022211007	L	Guru Mapel
5	Agustine Zai, S.Ag	197808272014072003	P	Guru Mapel
6	Arniswati Halawa, S.Pd	198209072012092001	P	Wali Kelas 9-1
7	Asafati Lahagu, S.Pd	-	L	KA. Tata Usaha
8	Darmawati Lahagu, S.Ag	-	P	Guru Mapel
9	Herlina Hulu, , S.Pd	198906112023212021	P	Wali Kelas 7-2
10	Hertamina A. Gulo, S.Pd	-	P	Guru Mapel
11	Irius Hia, S.Pd.K	198606012023211006	L	Guru Mapel
12	Jelita Lahagu, S.T	-	P	Guru Mapel
13	Lelikristiani Waruwu, S.Pd	199403092023212021	P	Guru Mapel
14	Marina Zalukhu, S.Pd	199204242023212030	P	Guru Mapel
15	Marni Gulo, S.Pd	-	P	Guru Mapel
16	Martianus Gulo, S.Pd	-	L	Guru Mapel

17	Miraniatman Gulo, S.Pd	199803062022212005	P	Guru Mapel
18	Murniwati Lahagu, S.Pd	199503242023212024	P	Guru Mapel
19	Rosminat Laoli, S.Pd	198501252022212029	P	Wali Kelas 8-2
20	Sartono Gulo, S.Pd	198207222022211006	L	Guru Mapel
21	Sriwahyuli Gulo, S.Pd	199210152023212038	L	Guru Mapel
22	Tuti Agustina Lahagu, S.Pd	-	P	Guru Mapel
23	Via Kristiani Gea, S.Pd	199104152022212016	P	Wali Kelas 8-1
24	Yasatulo Gulo, S.Pd	198111142023211003	L	Wali Kelas 7-1
25	Yedieli Gulo, S.Pd	9953764665110042	L	Wali Kelas 9-2

(Sumber: diolah dari dokumen tata usaha UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara)

b. Keadaan Siswa

Tabel 3 : Data Peserta Didik UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara

No	KELAS/ ROMBEL	SISWA		JUMLAH SISWA
		L	P	
1	VII-1	13	9	22
2	VII-2	11	9	20
3	VIII-1	9	6	25
4	VIII-2	7	7	24
5	IX-1	9	0	19
6	IX-2	9	1	20

(Sumber: diolah dari dokumen tata usaha UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara)

b. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang proses pembelajaran yang baik, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dipergunakan di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4 : Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Ruang Tata Usaha	1
2	Ruang Lab. Komputer	1
3	Ruang Perpustakaan	1
4	Ruang Kelas	14
5	Ruang Kepala Sekolah	-
6	Toilet/WC, Guru	2
7	Meja Siswa	150
8	Kursi Siswa	160
9	Meja Guru dan Kep.Sekolah	26
10	Kursi Guru	30

11	Kepala Sekolah	1
12	Meja Laboratorium IPA	4
13	Kursi Laboratorium IPA	10

(Sumber: diolah dari dokumen tata usaha UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara)

c. Kegiatan Pendukung

Tabel 5 : Kegiatan Pendukung

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Pramuka	Aktif
2	Vollyball	Aktif
3	Footsall	Aktif
4	Tenis Meja	Aktif
5	Badminton	Aktif
6	Tari/Sanggar	Aktif
7	Musik	Aktif

(Sumber: diolah dari dokumen tata usaha UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara)

4.2 Temuan Penelitian

Selama berada di lokasi penelitian yakni di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara peneliti mengumpulkan data melalui wawancara kepada pihak kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan kepada siswa. Wawancara yang dilakukan peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya.

Adapun temuan peneliti yang di peroleh peneliti yakni sebagai berikut :

1.2.1 Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan *Civic Disposition* bagi Peserta Didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe, bahwa *civic disposition* telah ditanamkan bagi peserta melalui guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Murni Lahagu, S.Th, selaku Kepala UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, beliau menjelaskan :

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian siswa, khususnya dalam menanamkan *civic*

disposition. Di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, guru PPKn bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun sikap cinta tanah air, tanggung jawab sosial, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Saya melihat bagaimana mereka membimbing siswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang mengarah pada pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik. Dengan pendekatan yang humanis dan dialogis, guru PPKn mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi dan etika publik sejak dini. Ini sangat penting demi menciptakan generasi muda yang berkarakter dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Civic disposition sangat penting karena membentuk karakter dan sikap siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Di tingkat SMP, peserta didik sedang dalam proses pembentukan identitas, dan inilah saat yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, cinta tanah air, dan kepedulian terhadap sesama.

Kepala sekolah menyampaikan bahwa guru PPKn secara aktif membimbing siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab, toleransi, cinta tanah air, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Guru PPKn juga sering mengaitkan materi pembelajaran dengan isu-isu aktual yang terjadi di lingkungan sekitar, agar siswa dapat memahami perannya sebagai warga negara yang baik.

Selain itu, menurut kepala sekolah kegiatan ekstrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) menjadi wadah penting dalam mendukung pembelajaran PPKn, karena siswa dilatih untuk bekerjasama, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah secara demokratis.

Guru PPKn di sekolah tersebut juga menjadi teladan dalam sikap disiplin dan adil, serta mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat dengan sopan, mendengarkan orang lain, dan menghargai perbedaan.

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Mesrawati Ndruru S.Pd, mengungkapkan bahwa :

Sebagai guru PPKn, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan civic disposition kepada peserta didik. Civic disposition bukan hanya soal pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga tentang sikap dan kebiasaan yang mencerminkan kepedulian terhadap sesama, menghargai perbedaan, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembelajaran, saya selalu berusaha mengaitkan materi dengan situasi nyata agar siswa dapat

memahami pentingnya nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Melalui diskusi kelas, studi kasus, dan proyek sosial sederhana, kami dorong siswa untuk tidak hanya paham, tapi juga terbiasa bersikap sebagai warga negara yang baik.

Civic disposition merupakan sikap dan karakter kewarganegaraan yang harus dimiliki setiap siswa. Hal ini mencakup sikap tanggung jawab, toleransi, gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut beliau, pendidikan PPKn tidak hanya mengajarkan teori atau pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga harus mampu membentuk sikap dan perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi.

Kemudian menurut Nolis Esteriani Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menyatakan bahwa :

Menurut saya, kadang materi yang disampaikan guru PPKn terasa terlalu teoritis dan kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, jadi kami sulit memahami maksudnya secara nyata. Selain itu, tidak semua teman-teman punya minat yang sama dalam pelajaran PPKn, sehingga suasana kelas kurang aktif. Kami juga melihat masih ada keterbatasan dalam kegiatan di luar kelas yang bisa membantu kami belajar tentang nilai-nilai kewarganegaraan secara langsung. Jadi, meskipun guru sudah berusaha, tapi tantangannya cukup besar untuk membuat kami benar-benar menerapkan sikap sebagai warga negara yang baik

Kemudian didukung dengan ungkapan dari Jhosep Tri Anugerah Gulo selaku siswa UPTD SMP Negeri Mandrehe Utara menyatakan bahwa :

Menurut saya, supaya pembelajaran PPKn lebih mudah dipahami, guru bisa menggunakan metode yang lebih menarik seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau menayangkan video yang berkaitan dengan sikap sebagai warga negara yang baik. Kami juga senang kalau diberi tugas proyek yang langsung berkaitan dengan lingkungan sekolah atau masyarakat. Dengan begitu, kami tidak hanya belajar teori, tapi juga praktik. Selain itu, kami sebagai siswa juga harus lebih aktif dan terbuka saat berdiskusi, supaya pembelajaran jadi lebih hidup dan bermanfaat."

Kemudian Paskalis Alfred Berkat Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menyatakan bahwa :

Saya merasa pelajaran PPKn itu penting, tapi kadang saya agak kurang tertarik. Guru PPKn sering menjelaskan tentang pentingnya menghargai orang lain dan mengikuti aturan, terutama saat ada kegiatan sosial atau upacara bendera. Kami juga sering diajak diskusi, tapi saya lebih suka diam dan tidak banyak berbicara di kelas. Saya tahu itu penting, tetapi kadang saya merasa pelajaran ini lebih banyak teori saja.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peran guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe utara. Para pihak yang diwawancarai sepakat bahwa Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara memiliki peran strategis dalam membentuk *civic disposition* atau sikap kewarganegaraan peserta didik. *Civic disposition* mencakup sikap tanggung jawab, toleransi, keadilan, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, guru PKn tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga membimbing siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan norma-norma demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan teladan dalam menanamkan sikap positif terhadap negara dan masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan penanaman *civic disposition* sangat bergantung pada kompetensi pedagogik, kepribadian, serta kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna dan relevan dengan realitas sosial siswa.

Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn yang diterapkan oleh guru PPKn sangat berpengaruh pada perkembangan sikap dan perilaku siswa sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

1.2.2 Kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan *Civic Disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara

Dalam penanaman *civic disposition* kepada peserta didik, tidak terlepas dari temuan kendala bahkan kelemahan sehingga penanaman sikap kenegaraan tersebut tidak berjalan dengan efektif.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Murni Lahagu, S.Th, selaku Kepala Sekolah bahwa :

Ada beberapa kendala yang kami identifikasi. Pertama, pengaruh lingkungan luar seperti media sosial dan tontonan yang kurang mendidik sangat besar terhadap perilaku siswa. Hal ini sering kali berlawanan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh guru PPKn. Kedua, waktu pembelajaran PPKn yang terbatas membuat guru tidak bisa mendalami materi secara maksimal, apalagi untuk membentuk sikap dan karakter siswa.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kendalanya adalah pengaruh lingkungan luar dan media sosial yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai positif. Selain itu, keterbatasan waktu pembelajaran formal membuat penanaman sikap harus dilakukan secara konsisten di luar jam pelajaran. Maka dari itu, keterlibatan seluruh guru dan orang tua sangat dibutuhkan.

Hal tersebut juga didukung oleh Ibu Mesrawati Ndruru, S.Pd selaku guru PPKn, yang mengungkapkan bahwa :

Sebagai guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, saya menyadari bahwa menanamkan *civic disposition* atau sikap kewarganegaraan kepada peserta didik bukanlah hal yang mudah. Ada sejumlah tantangan yang kami hadapi di lapangan. Selain itu, alokasi waktu pembelajaran PPKn dalam kurikulum cukup terbatas. Sementara, untuk membentuk sikap dan karakter tidak bisa dilakukan hanya dalam beberapa jam per minggu. Dibutuhkan pendekatan yang berkelanjutan dan kolaboratif, yang melibatkan seluruh unsur sekolah dan juga keluarga.

Kemudian menurut hasil wawancara dari siswa Nolis Esteriani Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menyatakan bahwa :

Saya rasa salah satu kendala utama yang dihadapi guru adalah waktu yang terbatas. Kadang-kadang, ada banyak materi yang harus diajarkan, jadi diskusi atau kegiatan yang berkaitan dengan *civic disposition* tidak selalu bisa dilakukan secara mendalam. Tapi, saya melihat guru berusaha memberikan contoh nyata tentang

bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang baik, seperti lewat kegiatan sosial dan diskusi tentang isu sosial atau kebangsaan. Guru juga sering mengingatkan kami untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan menghargai teman-teman, namun terkadang ada teman-teman yang tidak begitu peduli dengan hal itu.

Kemudian menurut Jhosep Tri Anugerah Gulo selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menyatakan bahwa :

Guru PPKn kadang-kadang kesulitan untuk membuat pelajaran lebih menarik bagi kami. Meskipun mereka sering mengajak kami berdiskusi atau terlibat dalam kegiatan sosial, kadang saya merasa kurang tertarik dengan materi yang diajarkan. Kadang kami juga tidak terlalu antusias mengikuti kegiatan kebersihan atau diskusi karena merasa itu hanya sekadar kewajiban. Saya rasa kurangnya motivasi dari beberapa teman-teman bisa jadi salah satu tantangan bagi guru. Mungkin guru harus lebih kreatif agar kami lebih peduli dengan nilai-nilai yang diajarkan.

Kemudian menurut Paskalis Alfred Berkat Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menyatakan bahwa :

Saya merasa kadang pelajaran PPKn terlalu banyak teori, dan tidak semua teman-teman saya tertarik dengan hal itu. Guru PPKn memang sering menjelaskan tentang pentingnya menghargai orang lain dan mengikuti aturan, terutama saat ada kegiatan sosial atau upacara bendera. Namun, saya rasa ada beberapa teman yang tidak terlalu peduli atau terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Saya tahu itu penting, tapi kadang saya merasa lebih banyak teori dari pada praktik, dan itu membuat saya kurang tertarik. Saya rasa mungkin guru PPKn bisa lebih menarik dalam menyampaikan materi supaya lebih menyentuh kami semua.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi guru PPKn dalam menanamkan *civic disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara.

Kendala utama dalam pengajaran *civic disposition* di sekolah adalah terbatasnya waktu untuk membahas materi secara mendalam. Kepala sekolah dan guru mengungkapkan bahwa materi pelajaran PPKn yang padat sering kali menghalangi diskusi yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan dan sikap kenegaraan. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan luar sekolah, seperti keluarga dan masyarakat, juga menjadi tantangan, karena nilai-nilai yang diajarkan di sekolah

kadang tidak sejalan dengan yang diterima siswa di rumah atau masyarakat.

Siswa juga merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran ini dengan antusias, karena terkadang mereka merasa kurang tertarik dengan teori yang disampaikan dan tidak melihat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan sosial atau diskusi yang berkaitan dengan *civic disposition*, karena merasa itu hanya sekadar kewajiban.

Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi adalah waktu yang terbatas, kurangnya motivasi dari siswa, serta kurangnya kerjasama yang erat antar sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan sikap kenegaraan.

1.2.3 Upaya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengatasi kendala dalam menanamkan *Civic Disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara

Wawancara ini dilakukan dengan kepala sekolah UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, yang memberikan pandangan dan informasi mengenai berbagai upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menanamkan *civic disposition* kepada peserta didik.

Adapun pernyataan Bapak Murni Lahagu, S.Th selaku Kepala Sekolah adalah :

Guru PPKn di sekolah kami terus berupaya mengatasi kendala yang ada, terutama pengaruh negatif dari lingkungan luar seperti media sosial. Salah satu langkah yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dan kontekstual, seperti diskusi, simulasi, dan studi kasus. Dengan begitu, siswa bisa memahami nilai-nilai kewarganegaraan melalui pengalaman langsung, bukan hanya lewat teori. Selain itu, para guru juga mengintegrasikan nilai-nilai *civic disposition* dalam kegiatan sekolah, seperti kerja bakti, OSIS, dan proyek profil pelajar Pancasila. Ini penting agar siswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga mempraktikkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan gotong royong dalam kesehariannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Mesrawati Ndruru, S.Pd yang mengungkapkan bahwa :

Salah satu kendala utama yang saya hadapi adalah kurangnya dukungan dari lingkungan luar, terutama dari media sosial yang sering membawa pengaruh negatif bagi siswa. Untuk mengatasi ini, saya berusaha membangun komunikasi yang kuat dengan siswa dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Saya juga menggunakan metode pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Harapannya, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, misalnya dalam hal sikap toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi.

Kemudian menurut Nolis Esteriani Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara Menyatakan Bahwa :

Guru PPKn kami sering menjelaskan pentingnya bersikap baik sebagai warga negara, meskipun ada teman-teman yang kadang tidak serius. Tapi gurunya sabar dan tetap mengingatkan kami supaya bisa berubah jadi lebih baik. Kalau kami susah paham, guru biasanya kasih contoh dari kehidupan sehari-hari, atau bercerita tentang kejadian yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu membantu saya lebih mengerti dan tidak bosan.

Kemudian dilanjutkan oleh Jhosep Tri Anugerah Gulo selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara Menyatakan juga bahwa :

Guru juga sering mengajak kami diskusi, jadi kami bisa saling tukar pendapat dan belajar menghargai orang lain. Menurut saya, itu salah satu cara guru mengatasi kami yang kadang cuek atau tidak peduli.

Hal ini juga diungkapkan oleh Paskalis Alfred Berkat Lahagu selaku siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menyatakan bahwa :

Selain belajar di kelas, kami juga diajak ikut kegiatan seperti kerja bakti, lomba kebersihan, dan kegiatan OSIS. Di situ kami belajar tanggung jawab dan kerja sama. Saya rasa itu cara guru supaya kami bisa praktik langsung nilai-nilai yang diajarkan.

Berdasarkan ungkapan para siswa, dapat disimpulkan bahwa guru PPKn telah berupaya secara aktif dan kreatif dalam menanamkan nilai-nilai *civic disposition* meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya minat sebagian siswa, pengaruh lingkungan luar, dan

keterbatasan waktu pembelajaran. Para siswa merasakan bahwa guru berusaha menggunakan metode pembelajaran yang menarik, seperti diskusi, pemberian contoh konkret, dan simulasi, untuk membantu mereka lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan.

4.3 Pembahasan

Civic disposition atau sikap kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang mencerminkan perilaku dan sikap warga negara yang baik. Guru PKn memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, terutama di jenjang SMP, saat peserta didik sedang dalam tahap perkembangan karakter yang signifikan

4.3.1 Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Menanamkan *Civic Disposition* bagi Peserta Didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) peserta didik. *Civic disposition* sendiri mencakup sikap dan kebiasaan berpikir serta bertindak yang mencerminkan kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab, toleran, aktif, dan demokratis.

Zamroni (2011) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga proses pembentukan karakter dan kebiasaan berpikir serta bertindak sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, guru PPKn harus mampu menghadirkan pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk memahami, merasakan, dan menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, seperti yang diungkapkan oleh siswa UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, masih terdapat kendala yang dihadapi guru PPKn, di antaranya metode pembelajaran yang kurang variatif, keterbatasan media pembelajaran, serta kurangnya keterlibatan siswa

dalam kegiatan praktis. Hal ini sejalan dengan pendapat Hoskins & Deakin Crick (2010) bahwa keberhasilan pembentukan *civic disposition* tidak hanya tergantung pada materi ajar, tetapi juga pada strategi pedagogis yang digunakan dan lingkungan belajar yang mendukung.

Di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, guru PPKn memegang tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai *civic disposition* tersebut. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyampaian materi, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan moral, sikap, dan perilaku sehari-hari peserta didik.

Pertama, guru bertindak sebagai pendidik nilai dan karakter. Melalui materi yang mengandung nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, guru PPKn membantu peserta didik memahami pentingnya menjadi warga negara yang menjunjung tinggi keadilan, menghargai perbedaan, dan bertindak jujur serta bertanggung jawab. Pembelajaran tidak hanya disampaikan secara kognitif, tetapi juga melalui metode yang mengajak siswa berpikir kritis dan merefleksikan sikap mereka sendiri.

Kedua, guru berperan sebagai teladan dalam sikap kewarganegaraan. Sikap guru di sekolah, seperti disiplin, keadilan dalam menilai, keterbukaan terhadap pendapat siswa, dan semangat gotong royong, menjadi contoh konkret bagi peserta didik. Keteladanan ini menjadi metode paling efektif dalam membentuk kebiasaan positif yang mencerminkan *civic disposition*.

Ketiga, dalam proses pembelajaran, guru juga memanfaatkan pendekatan partisipatif dan kontekstual. Misalnya, guru mengaitkan pembelajaran dengan realitas kehidupan siswa di lingkungan sekitar, seperti isu kebersihan lingkungan, kerja sama antarwarga sekolah, atau partisipasi dalam kegiatan desa. Hal ini menjadikan pelajaran lebih relevan dan mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir dan bertindak sebagai warga negara yang aktif dan peduli.

Keempat, guru mendorong peserta didik untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa kewarganegaraan. Melalui kegiatan seperti debat, diskusi isu sosial, lomba pidato, dan kerja bakti,

peserta didik dilatih untuk memiliki sikap tanggung jawab, rasa empati, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.

Civic disposition dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran yang integratif, partisipatif, dan kontekstual, yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan sosial di dalam dan luar sekolah. M. S. Yudhistira (2016:334).

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya minat siswa terhadap pelajaran PPKn yang dianggap kurang aplikatif, serta keterbatasan media pembelajaran yang menarik. Untuk mengatasi hal ini, guru dituntut lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran yang bermakna, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dan melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses belajar.

Dengan demikian, peran guru PPKn sangat penting dalam menanamkan *civic disposition*. Keberhasilan guru dalam menjalankan peran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya generasi muda yang sadar hak dan kewajibannya, mencintai negaranya, dan siap berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

4.3.2 Kendala yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan *Civic Disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara

Menanamkan *civic disposition* kepada peserta didik merupakan bagian penting dari tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Civic disposition* mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, kepedulian sosial, kejujuran, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam praktiknya, guru PPKn di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penanaman nilai-nilai tersebut.

Menurut Hoskins dan Crick (2010), kendala utama dalam menanamkan *civic disposition* adalah karena pendekatan pembelajaran yang masih berorientasi pada kognitif semata. Mereka menekankan bahwa *civic disposition* tidak hanya dapat dibentuk melalui pengetahuan, tetapi

memerlukan pendekatan afektif dan partisipatif, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan kehidupan sosial di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang monoton menjadi salah satu faktor penghambat.

Winataputra (2011:44) juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan dalam pembelajaran PPKn adalah minimnya media dan sumber belajar yang kontekstual, yang menyebabkan siswa kesulitan mengaitkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan kehidupan nyata. Kondisi ini relevan dengan situasi di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, di mana masih terbatasnya sarana pembelajaran dan pengayaan membuat guru kurang optimal dalam menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, dan partisipasi sosial.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan sarana penting dalam membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan peserta didik. Salah satu tujuan utamanya adalah menanamkan civic disposition, yaitu sikap dan nilai-nilai yang mencerminkan kesadaran serta tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, dalam pelaksanaannya, guru PPKn di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan ini secara optimal.

Zamroni (2011:67) menambahkan bahwa dalam konteks pendidikan di daerah, faktor lingkungan sosial dan budaya juga dapat menjadi kendala, seperti kurangnya keteladanan di lingkungan sekitar atau kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap nilai-nilai kewarganegaraan. Hal ini mengakibatkan nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah tidak terinternalisasi secara konsisten dalam kehidupan siswa sehari-hari.

Selain itu, Lickona (2015:89) menyebutkan bahwa dalam pendidikan karakter termasuk *civic disposition*, guru harus mengajar, memberi contoh, dan membiasakan. Bila salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka hasil pendidikan akan kurang efektif. Seringkali, keterbatasan waktu, beban administrasi, dan kurangnya pelatihan membuat

guru tidak bisa maksimal menjadi *role mode* dan fasilitator nilai bagi siswa.

Dari kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa kendala guru dalam menanamkan civic disposition bukan hanya berasal dari metode mengajar, tetapi juga dari faktor eksternal seperti dukungan lingkungan, fasilitas sekolah, dan budaya belajar siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang kolaboratif dan kontekstual agar pembelajaran PPKn dapat mencapai tujuannya secara utuh.

4.3.3 Upaya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengatasi kendala dalam menanamkan *Civic Disposition* bagi peserta didik di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara

Civic Disposition atau sikap kewarganegaraan merupakan komponen penting dalam pendidikan PPKn yang mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, kepedulian, toleransi, kejujuran, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, guru PPKn menghadapi sejumlah kendala dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik.

Di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara, upaya guru dalam mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui berbagai strategi berikut:

1. Mengintegrasikan Nilai *Civic Disposition* dalam Kegiatan Pembelajaran. Guru tidak hanya mengajarkan materi secara teoritis, tetapi juga memasukkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam diskusi, studi kasus, simulasi, dan permainan peran (*role play*). Dengan cara ini, siswa dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut secara kontekstual.
2. Menjadi Teladan (*Role Model*) bagi Peserta Didik. Guru berperan sebagai contoh nyata dalam menunjukkan sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan toleran. Keteladanan ini penting untuk menumbuhkan nilai *Civic Disposition* secara tidak langsung melalui observasi dan pengalaman nyata siswa terhadap perilaku guru.
3. Pendekatan Personal dan Sosial. Guru melakukan pendekatan yang bersifat pribadi kepada siswa yang menunjukkan perilaku kurang baik.

Dialog interpersonal digunakan untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa akan pentingnya memiliki sikap kewarganegaraan yang baik.

4. Pemanfaatan Kegiatan Ekstrakurikuler dan Proyek Profil Pelajar Pancasila. Ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, dan kegiatan sosial menjadi sarana yang efektif dalam menanamkan sikap bertanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian sosial. Guru PPKn mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan ini agar nilai-nilai *Civic Disposition* terasah secara praktis.
5. Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat. Guru menjalin komunikasi dengan orang tua siswa untuk memberikan penguatan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan rumah. Selain itu, kerja sama dengan tokoh masyarakat lokal juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang mendukung penanaman nilai positif.
6. Mengatasi kendala internal dan eksternal. Beberapa kendala seperti kurangnya minat siswa, pengaruh media sosial, dan latar belakang keluarga ditangani dengan pendekatan motivasional dan adaptif. Guru berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa untuk meningkatkan keterlibatan mereka.
7. Pemanfaatan Media dan Teknologi. Guru memanfaatkan video pembelajaran, media sosial yang mendidik, dan konten digital lainnya untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan kewarganegaraan dengan cara yang lebih menarik dan dekat dengan dunia siswa.

Tujuan utama dari penguatan *civic disposition* adalah agar peserta didik tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, guru PPKn sering menghadapi berbagai kendala dalam proses penanaman nilai-nilai tersebut.

Guru PPKn di UPTD SMP Negeri 1 Mandrehe Utara berperan sentral dalam menanamkan *civic disposition*, meskipun menghadapi berbagai kendala. Melalui kombinasi pendekatan pedagogis, keteladanan, kolaborasi dengan orang tua, dan pemanfaatan media, mereka berupaya secara aktif menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung

pembentukan karakter peserta didik. Kendati hasilnya tidak instan, upaya ini menjadi landasan penting bagi pengembangan warga negara yang berkarakter dan bertanggung jawab.